

# Peran Perempuan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis

Andini<sup>1\*</sup>, Yeni Huriani<sup>2</sup>, Eni Zulaiha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung; <sup>1\*</sup> andininovitasari564@gmail.com, <sup>2</sup> yenihuriani@uinsgd.ac.id, <sup>3</sup> enizulaiha@uinsgd.ac.id

\*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 13 Oktober 2021

Artikel Diterima: 21 November 2022

Artikel Dipublikasikan: 14 Desember 2022

**Abstrak:** Pandemi Covid 19 di Indonesia mulai dari awal maret 2020 hingga 2021 menyisakan banyak cerita yang seakan-akan tidak berujung. Dampak dari pandemi pun banyak membuat semua kalangan kewalahan, begitupun perempuan. Sebagai pusat kendali dalam keluarga, perempuan memiliki peran ekstra selama masa pandemi. Terlebih pada kebijakan pemerintah untuk mengalihkan semua pekerjaan melalui rumah. Sehingga perempuan harus memainkan peran ekstra dalam menstabilkan keluarga di masa pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan studi kepustakaan untuk melihat sumber-sumber penelitian tentang perempuan di masa pandemi Covid 19 dengan pendekatan menggunakan teori Feminisme sosialis. Hasilnya perempuan memiliki peran besar di masa pandemi Covid 19 baik di sektor keluarga maupun perekonomian. Perempuan aktif dan tanggap dalam merespon kesulitan dalam keluarga. Terlebih feminisme sosialis menekankan untuk perempuan dapat mengarahkan anggota keluarga dalam peran-peran dasar dalam keluarga sehingga terbentuk sebuah harmonisasi dalam kerjasama.

**Kata Kunci:** *Peran Perempuan, Pandemi Covid 19, Feminisme Sosialis*

**Abstract:** The Covid 19 pandemi in Indonesia from early March 2020 to 2021 left many stories that seemed endless. The impact of the pandemi has overwhelmed many people, as well as women. As the control center in the family, women have an extra role to play during a pandemi. Especially in the government policy to divert all work through the home. So that women have to play an extra role in stabilizing the family during the Covid 19 pandemi. This study uses a descriptive quantitative research method that aims to describe how women describe during the Covid 19 pandemi with an analysis using the theory of socialist feminism. As a result, women played a big role during the Covid 19 pandemi in both the family and economic sectors. Women are active and responsive in responding to difficulties in the family. Moreover, socialist feminism emphasizes that women can direct family members in basic roles in the family so that a harmonization is formed in cooperation.

**Keywords:** *Role of Women, Covid 19 Pandemi, Socialist Feminism*

## 1. Pendahuluan

Sejak wabah Covid 19 hadir pada akhir tahun 2019 di China, sebanyak 110.000 lebih orang terinfeksi dan mencapai 3.600 orang dari 80 lebih meninggal di seluruh penjuru dunia. Dampak yang diakibatkan bukan hanya pada ranah kesehatan, akan tetapi ekonomi, sosial, kebudayaan dan sektor-sektor penting lainnya. Semua negara sepakat akan adanya penutupan massal dalam segala sektor, dan semua kegiatan dialihkan di rumah, dengan hastag (#)

#dirumahaja atau #stayathome dikampanyekan oleh semua pihak melalui media sosial untuk mengajak semua orang tetap di rumah dalam upaya untuk pencegahan penyebaran virus Covid 19.

Namun apakah hastag #dirumahaja atau #stayathome mampu menghentikan penyebaran Covid 19? Lantas apakah dampak yang ditimbulkan setelah ada kebijakan tersebut? Siapakah pihak yang harus bekerja lebih ekstra saat diberlakukannya kebijakan tersebut? Ketiga pertanyaan ini diharapkan mampu melihat bagaimana Covid 19 memberikan beban ganda dan ekstra pada perempuan. Terutama pada pertanyaan ketiga menunjukkan peran sentral perempuan dalam rumah. Dimana perempuan bertanggung jawab dalam setiap hal yang berkaitan dengan rumah, selama pandemi pun perempuan tidak bisa berbagi tugas dengan suami walaupun keduanya berada di rumah.

Permasalahan lain yang dialami oleh perempuan di masa pandemi yakni kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Melalui hasil wawancara oleh tim kompas.com bahwa ada 400.000 kehamilan yang tidak diinginkan terjadi selama pandemi. Hal ini dikonfirmasi oleh dr. Hasto Wardoyo, SpOG pada hari selasa, 19 Mei 2020 selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional. Alasan paling banyak ditemukan adalah karena adanya pembatasan berskala besar, menjadikan suami dan istri tidak melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga kegiatan yang dapat dilakukan adalah hubungan seksual, yang disayangkan adalah tidak menggunakan alat kontrasepsi (Administrator, 2020a; Windi, 2022).

Kasus di atas kemudian mengarah pada beban kehidupan bertambah dan menimbulkan sebuah permasalahan baru yakni Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Walaupun kasus KDRT tidak melulu tentang kehamilan yang tidak diinginkan, beberapa kasus menurut konselor hukum Rifka Annisa WCC, Nurul Kurniati, S. H. menjelaskan bahwa kasus KDRT di masa pandemi memiliki variasi penyebab yang kompleks. Mulai dari kebutuhan harian, kesehatan, prinsip hidup, dan komunikasi tidak efektif antara suami-istri. Kehamilan yang tidak diinginkan masuk pada kebutuhan harian yang harus dipenuhi seperti susu kehamilan, pemeriksaan rutin ibu dan bayi, biaya persalinan, perlengkapan bayi dan hal lainnya. Hal ini bukan hanya menjadi beban secara psikis akan tetapi ekonomi dan sifatnya yang harus ada sebagai penunjang keberlangsungan hidup. Sehingga kasus KDRT dapat terjadi karena sebuah tekanan yang tidak sesuai dengan realita yang ada (Dafeni, Mawarni, Nugroho, & Dharmawan, 2017; Gusliana, 2010; Muna, Rauf, & Krismantari, 2020; Wakela & Nurkhotijah, 2020).

Perjalanan pun berlanjut setelah adanya kasus KDRT, yakni perceraian. Melirik pada belahan dunia yang lain, Firma hukum di Inggris, Stewarts, memiliki 12 % lebih banyak dokumen tentang permohonan perceraian pada Juli hingga Oktober 2020. Di Amerika Serikat, dokumen permohonan perceraian masuk 34% dan yang paling banyak menyumbang kasus adalah pasangan yang baru menikah dalam kurun waktu lima bulan yakni 20% (Bantulu,

2008). Jika melihat di Indonesia, pada tahun 2020 angka perceraian meningkat yakni 479 kasus di Kabupaten Merangin, Jambi. Dan menurut data perceraian pertahun menurut Mahkamah Agung pada bulan April sampai Agustus ada 306.688 total kasus dari 228.240 gugat cerai dan 74.448 cerai talak (Sucahyo, n.d.). Faktor yang paling banyak diungkapkan oleh penggugat adalah ekonomi. Dan yang paling menyedihkan adalah ada 100 kasus perceraian dalam sehari yang terjadi di Indramayu. Adapun ada beberapa alasan lain yang diungkapkan oleh psikolog Ikhsan Bella Persada, M.Psi (Klikdokter, 2020). yakni:

- 1) Punya kebiasaan yang tidak biasa, maksudnya adalah aktivitas antara suami istri yang jarang dilakukan, kemudian menjadi lebih sering karena pandemi Covid 19. Misalnya, hubungan suami istri yang terbiasa jarak jauh, kemudian di saat pandemi mereka harus bertemu lebih sering di rumah, maka hal ini dapat memunculkan konflik baru dalam rumah tangga.
- 2) Muncul rasa jenuh, hal ini tentu dapat dirasakan pasti bagaimana pembatasan sosial yang mengharuskan tetap tinggal di rumah, semua aktivitas dari rumah, akan menimbulkan rasa jenuh yang amat sangat, jika tidak ada modifikasi dan inovasi.
- 3) Faktor usia pernikahan, usia pernikahan yang masih sangat mudah lebih banyak memiliki kerentanan dalam perceraian, karena masa-masa ini masih dalam tahap pengenalan, pembiasaan, dan pemahaman, sehingga jika tidak sampai pada sikap saling memahami maka, perceraian adalah jalan yang akan dipilih. Walaupun bukan berarti usia pernikahan yang sudah lama juga tidak berkemungkinan. Semuanya memiliki fase dan faktor tersendiri.

Perdana Menteri Narendra Modi yang ditekan oleh sebuah petisi daring untuk meminta suami-suami yang ada di India agar ikut dalam membantu pekerjaan perempuan selama pandemi Covid 19. Munculnya sebuah petisi daring dilatar belakangi banyaknya perselisihan dan perkelahian antara suami dan istri saat melakukan pekerjaan rumah. Salah satu isi dari petisi daring tersebut adalah "Apakah di gagang sapu tertulis: 'hanya untuk dioperasikan oleh perempuan?'" penulis petisi tersebut ditulis oleh Subarna Ghosh seorang ibu rumah tangga yang merasa kewalahan karena harus melakukan semua pekerjaan rumah sendiri, kemudian menyelesaikan tugas anak, dan melayani suami. Baginya, harus ada pembagian tugas dan tidak hanya dibebankan hanya kepada perempuan. Pada tulisan akhir petisi Subarna menulis "ini pertanyaan mendasar, akan tetapi kenapa tidak ada orang yang membicarakannya" ("Covid - 19 di India: 'Perdana Menteri Narendra Modi, mohon agar laki-laki didorong berbagi pekerjaan rumah tangga!,'" 2020).

Berbeda halnya dengan Wakil Direktur Eksekutif UN Women yakni Anita Bhatia menyatakan pandemi Covid 19 akan menghilangkan kerja keras kita dalam memperjuangkan perempuan selama 25 tahun hanya dalam waktu setahun. Pernyataan tersebut berkaitan

dengan kesempatan akses pekerjaan dan pendidikan bagi perempuan di masa pandemi mengalami kemerosotan karena perempuan harus fokus menyiapkan segala kebutuhan rumah selama kebijakan diam di rumah berlangsung. Baginya kebijakan ini mengembalikan perempuan pada stereotip gender era 1950-an, dimana beban merawat dan mengasuh adalah tugas perempuan. Padahal sebelum pandemi berlangsung, perempuan telah melakukan 16 miliar jam kerja tanpa dibayar, sedangkan saat pandemi jumlahnya akan semakin naik. Di Jepang misalnya 4,8 kali kenaikan jam kerja perempuan di masa pandemi (Sandrine & Amelia, 2020).

Bukan hanya dalam jam kerja, perempuan selama pandemi Covid 19 harus siap sedia selama 24 jam untuk keluarganya. Perempuan bukan hanya lelah secara fisik akan tetapi mental juga sosialnya. Perempuan seakan-akan tidak boleh keluar untuk sejenak menenangkan dirinya, karena masih banyak pekerjaan yang menanti di rumah. Hal ini sungguh ironis dan sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja. Perempuan akan mengalami sebuah trauma psikologis karena dampak pandemi Covid 19 yang tak kunjung pasti kapan berakhirnya kebijakan untuk tetap di rumah.

Melalui kajian di atas, penulis merasa perlu untuk meninjau kembali peran dan tugas perempuan selama masa pandemi Covid 19. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi laki-laki maupun perempuan memahami peran dan fungsinya dalam rumah tangga terlebih di masa pandemi Covid 19, di mana semua anggota keluarga harus mampu bekerja sama untuk tetap kuat dan saling mendukung pada masa pandemi Covid 19.

Disamping perempuan harus mampu untuk berperan aktif di rumah bersama anggota keluarga. Perempuan juga diharapkan mampu untuk berinovasi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi di masa pandemi Covid 19 melalui media sosial agar tidak lagi bergantung terhadap laki-laki. Sehingga perempuan dapat keluar dari jerat patriarki dalam posisi di dalam keluarga maupun ekonomi.

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam tulisan ini adalah pandemi Covid 19 adalah sebuah musibah yang menyerang semua orang tanpa melihat usia, jenis kelamin, gelar, status sosial, agama dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk membebaskan segala pekerjaan terutama dalam kehidupan rumah tangga hanya pada perempuan. Sehingga untuk kuat dalam masa pandemi Covid 19 bukan hanya sehat jasmani, juga sehat mental bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan.

Manfaat lain adalah melalui pendekatan teori feminisme sosialis, perempuan dapat lebih memahami bahwa perempuan memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan pekerjaan baik dalam bidang domestik dan publik. Perempuan mampu keluar dari budaya patriarki baik di dalam keluarga utamanya maupun dalam bidang sosial ekonomi. Melalui tulisan ini, perempuan dapat melihat peluang untuk mandiri terutama dalam ekonomi.

Dalam memulai kajian tentang perempuan dan Pandemi Covid 19 ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan kajian. Seperti pada jurnal yang di tulis oleh Putu Sekarwangi Sarawasti dan I Nengah Susrama yang menjelaskan tentang peran sentral perempuan dalam menjaga dan menenangkan dalam keluarga selama masa pandemi Covid 19. Sehingga bagi mereka perempuan bukan hanya disadari kemampuannya akan tetapi harus diberikan apresiasi. terlebih perhatian ekstra terhadap anak yang harus terpenuhi selain menyelesaikan tugas rumah (Napsiah, Permata, Fithriya, & Hikmalisa, 2021; Sapija, 2019; Saraswati & Susrama, 2020).

Lain halnya dengan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Haekal dan Ainal Fitri lebih memfokuskan subjek penelitiannya pada perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai dosen. Hal ini sungguh menarik karena dosen sebagai pendidik di lembaga sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Temuan dari penelitian ini pun tidak kalah menarik, di mana keadilan gender dalam peran perempuan tidak memiliki tempatnya dan tidak memandang apa pekerjaannya. Walaupun demikian, ada sebuah ruang yakni di lingkungan akademi yang menjunjung tinggi keadilan gender sehingga hal ini memberikan ruang nafas bagi perempuan, di samping tugasnya dalam rumah tangga (Haekal & Fitri, 2020).

Untuk melihat sekilas kondisi perempuan di masa pandemi, Eka dan Biko dalam jurnal penelitiannya yang bercorak fenomenologi menjelaskan kehidupan perempuan yang hidup di kampung Kue Rungkut Lor II, mereka harus mencari nafkah sebelum pandemi dan harus mengalami keterhisapan dan ketertindasan selama pandemi Covid 19 dan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung. Mereka menanggung beban tiga kali lipat beban keluarga dibandingkan laki-laki (Sari & Zufar, 2021).

Selain Eka dan Biko, Atnike dalam jurnalnya *Women and Covid-19 Pandemi* menjelaskan perempuan bukan hanya dalam peran domestik yang makin menumpuk, pada sektor penghasilan perempuan pada masa pandemi mengalami ketidakadilan, dimana banyak upah yang dipotong akan tetapi jam kerja meningkat. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga yang semakin menjadi atau disebut juga Shadow Pandemi. Atnike juga menyebutkan bahwa lingkungan patriarkhis lebih banyak dibandingkan lingkungan ramah perempuan. Hal inilah yang menjadi simpulan dari jurnalnya bahwa perempuan selalu dalam lingkungan ketidakadilan (Sigiro, 2020).

Dalam memperjuangkan sebuah kesetaraan bagi perempuan, dimana pada tahun 1880 melakukan sebuah pergerakan yang dipelopori oleh perempuan-perempuan untuk menuntut hak-hak politik dan kesetaraan hukum. Terbukti pada abad ke-18, peran perempuan maupun laki-laki memiliki pekerjaan yang mampu mendatangkan uang sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga dan tercatat dalam buku *a vindication of the Rights of women* (Tong, 2017). Gerakan feminisme diarahkan untuk mengkritik struktur patriarkhat dalam masyarakat, hal tersebut

merupakan usaha bukan hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, sekaligus berusaha untuk menciptakan suasana masyarakat yang lebih adil gender juga kesetaraan gender. Sehingga gerakan feminisme bukan hanya berfokus terhadap perempuan, segala sesuatu yang berkaitan tentang hubungan laki-laki dan perempuan adalah bidang kajian dalam gerakan feminisme.

Gerakan feminisme mendorong untuk menjadi manusia yang utuh baik sebagai individu maupun dalam struktur masyarakat. Jika melihat dari definisi dari Conn tentang feminisme yakni “sebuah sistem yang tertata dalam memperjuangkan perempuan melalui aksi nyata sebagai bentuk kesadaran dalam masyarakat bahwa merendahkan perempuan bukanlah salah satu tanda laki-laki yang hebat, justru sebaliknya, laki-laki terlihat lemah karena telah mengekang perempuan dengan segala budaya patriarkhat nya” (Jones, 1991). Sehingga feminisme bukan hanya sebuah gerakan yang meninggikan perempuan, sekaligus mengembalikan derajat laki-laki.

Feminisme Sosialis merupakan cabang dari feminisme yang berfokus pada gender dan ekonomi. Dalam pandangan Marx, perempuan merupakan sebuah penghuni kelas ekonomi juga kelas seks yang disebutkan oleh Firestone. Yang mana perempuan dipandang sebagai seseorang yang mampu untuk dijadikan sebagai seseorang yang mampu melayani kebutuhan laki-laki tanpa diberi gaji maupun tunjangan resmi tentu hal tersebut pemikiran kapitalisme, yang tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya upah atas apa yang dikerjakan perempuan (Sjahrir, 1982).

Feminisme Sosialis memandang bahwa kapitalisme penyebab adanya ketidakadilan pada perempuan, ketidakadilan tersebut merupakan hasil dari struktur politik, sosial, dan ekonomi. Pekerjaan perempuan adalah dianggap pekerjaan yang memiliki durasi terlama dan tak kunjung usai, sehingga membentuk sebuah konsepsi dalam perempuan bahwa jika pekerjaan tersebut tidak dikerjakan maka dia bukanlah perempuan (Tong, 2017). Pemahaman yang demikian telah mengakar dan diterima semua perempuan dari masa ke masa tanpa adanya pemahaman secara mendalam. Sehingga ketidakadilan yang dialami oleh perempuan terus menerus dibentuk sedemikian rupa dan mengikat perempuan.

## **2. Pembahasan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap tentang perempuan di masa pandemi Covid 19 melalui studi buku, artikel dan jurnal. Data yang digunakan diambil melalui media sosial dan internet yang berkaitan tentang perempuan dan pandemi Covid 19. Sumber-sumber landasan teoritis diambil melalui jurnal penelitian dan buku-buku terkait feminisme sosialis, perempuan, dan pandemi Covid 19.

## 2.1 Feminisme Sosialis

Feminisme merupakan gerakan pada tahun 1880-an yang dilandasi oleh keresahan masyarakat. Keresahan ini dilator belakangi oleh ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme mengacuh dalam sebuah teori kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Walaupun demikian, feminisme dianggap sebagai gerakan memperoleh hak-hak perempuan saja. Padahal, feminisme berusaha untuk mengantarkan laki-laki dan perempuan pada keharmonisan kehidupan untuk saling berbagi dan saling bekerjasama dalam kehidupan (Djajanegara, 2000).

Istilah Feminisme berkaitan dengan istilah emansipasi yang berartikan sebuah ruang untuk pembebasan dalam berbagai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak perempuan mencapai kesetaraan dengan hak-hak laki-laki. Istilah "feminis" yang digunakan digunakan dalam literature Barat secara tegas mengungkapkan tuntutan untuk kesetaraan hukum dan politik sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki pada saat tahun 1880-an. Walaupun demikian, istilah ini senantiasa mendapat perdebatan karena dianggap di sisi lain menunjukkan gambaran ketimpangan gender, subordinasi dan penindasan terhadap perempuan. Di sisi lain, kaum patriarki menganggap hal ini merupakan gerakan yang menyimpang karena akan merusak tatanan yang telah lama melekat bahwa laki-laki adalah pemegang kekuasaan tertinggi (Arivia, 2006).

Dalam bukunya Mary Wollstonecraft *A Vindication of the Rights of Women* menjelaskan bagaimana kehidupan perempuan tidak memiliki sebuah nilai ekonom. Dalam buku tersebut, Mary menyebutkan bahwa pekerjaan yang sifatnya produktif dan menghasilkan uang bagi keluarga semuanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan hal tersebut terjadi pada abad 18. Akan tetapi saat kekuatan kapitalisme industrial memasuki Eropa, ada sebuah perubahan besar yang mengharuskan perempuan berperan dirumah dan laki-laki yang diperbolehkan bekerja dipabrik, yang mengakibatkan perempuan mulai ditinggalkan. Perubahan ini kemudian berdampak besar bagi perempuan pada tatanan kelas menengah yang memiliki pendidikan yang cukup. Mereka merupakan perempuan pengusaha dan professional yang mulai dirumahkan karena sudah menikah (Sugihastuti & Saptiawan, 2010).

Pokok penting dalam pembahasan feminisme berkaitan dengan hak-hak atas perempuan, kemudian bagaimana peranan perempuan, tugas dan fungsi perempuan dalam domestik maupun publik, dan bagaimana tanggung jawab perempuan dalam setiap ruang yang dimiliki. Melihat realitas bahwa perempuan sampai saat ini memiliki pandangan yang kurang baik terhadap perempuan. Di Indonesia misalnya, ada beberapa spekulasi tentang perempuan seperti "perempuan tidak boleh keluar malam", "perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi", "perempuan ujung-ujungnya di dapur", "perempuan tidak boleh melebihi laki-laki". Semua

spekulasi itu setiap saat digaungkan kepada perempuan dari kecil sampai dewasa. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi psikis perempuan yang harus dialami di Indonesia.

Gerakan feminisme tidak berjalan mulus hanya karena berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan. pertentangan, hambatan dan perselisihan juga dialami dalam perjalanan perjuangan kaum feminisme. Gerakan feminisme yang berusaha mengkritik struktur patriarkhat dalam masyarakat agar perempuan dan laki-laki dapat memasuki lingkungan masyarakat yang lebih adil dan harmonis (Hommes, 1992). Feminisme berharap saat lepasnya budaya patriarkhat dalam masyarakat mampu menciptakan sebuah lingkungan yang adil gender dan senantiasa mengedukasi masyarakat untuk memahami gender pada peran dan fungsi secara tepat (Clifford, 2002).

Menurut Joann Wolski dalam *Feminist Political Theory An Introduction*, feminisme merupakan seperangkat tatanan ide, yang mengarah pada gerakan nyata, yang bersumber pada sebuah kesadaran perempuan dalam melihat bagaimana kebudayaan mengikat dan mengendalikan perempuan, menindas kaum perempuan dan merendahkan martabat perempuan (Bryson, 2003). sehingga feminisme memiliki rekam jejak di lingkungan sosio kultural yang berakar pada pengalaman kaum perempuan yang berkaitan dengan diskriminasi dan penindasan atas dasar jenis kelamin. Selain pada kesetaraan, feminisme juga berfokus dalam membebaskan pada diskriminasi seksisme. Sebagai wujud untuk menjaga harkat dan hakikat sebagai kemanusiaan (Janah, 2017; Sakdiah, 2021; Umar, Mas'ud, & Husain, 2017).

Feminisme Sosialis merupakan salah satu bentuk dari perkembangan Feminisme. jika feminisme liberal berusaha untuk kesetaraan kesempatan, kemudian feminisme radikal untuk keluar dari budaya patriaki, feminisme sosialis berupaya untuk mengenalkan kekayaan pribadi. Bagi feminisme sosialis, penindasan terhadap perempuan bukan hanya tanggung jawab patriaki tetapi juga kelas. Feminisme sosialis menggunakan pendekatan Marxian dalam memahami sarah dan pergerakan penindasan terhadap perempuan, yang berkaitan dengan banyak hal terutama pada jenis kelamin, kemudian pembagian tugas yang berdasarkan pada tingkat jenis kelamin. Feminisme sosialis mengarahkan pada penindasan kelas (kontrol terhadap kekayaan dan sumber-sumber produksi oleh kaum borjuis) dan penindasan perempuan (hukum-hukum patriarki yang mengontrol perempuan melalui perkawinan) (Tong, 2017).

Juliet Mitchell dalam bukunya *Women's Estate* menjelaskan dasar-dasar feminisme sosialis. Juliet melihat bahwa ada faktor-faktor politik dalam tindakan ketidakadilan terhadap perempuan, yang berhubungan erat pula dengan penindasan pada level tertentu. Ia menjelaskan bahwa ada konsep-konsep khusus dalam setiap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Kemudian pada karya lanjutannya *Psychoanalysis and Feminism*, Mitchell lebih lanjut menggambarkan bagaimana konsep patriarki serta kapitalisme yang menggunakan

kekuatan untuk melakukan penindasan terhadap perempuan (Jane C., Helen A., Terj. Budi, & Yan, 1996). sehingga dengan tegas, dia sangat menentang bahwa ada ikut serta ekonomi atau akses lainnya dalam proses ketidakadilan terhadap perempuan.

Feminisme sosialis meyakini bahwa kapitalisme memiliki peran penting dalam terwujudnya penindasan terhadap perempuan. Perempuan dasingkan dalam setiap kultur sosial politik dan tetap bertahan pada pekerjaan rumah tangga yang memakan banyak waktu dan tidak menghasilkan sebuah kemajuan bagi perempuan, akhirnya perempuan harus tertinggal dan hanya terkukung pada hal-hal domestik saja (Tong, 2017).

Dalam teori ekonomi Marxis, Feminisme sosialis yang disebut juga sebagai feminisme marxis yang mana perempuan diyakini memiliki sifat dan kepribadian yang unggul dalam merasa. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk tidak lepas dari urusan domestik seperti merawat anak, padahal tugas perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga adalah saling membantu dan saling mengerti. Akan tetapi kenyataannya, perempuan dibebankan untuk menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tanpa dimengerti dan dihargai (Effendi, 2003)

Sistem kapitalisme dianggap sebagai penyebab adanya pembagian pekerjaan domestik dan publik. Sehingga feminisme sosialis memasukan kapitalisme sebagai penyebab atas ketidak setaraan yang dialami oleh perempuan. Dan dalam penolakan terhadap budaya patriarki, feminisme sosialis sependapat dengan feminisme radikal.

Dalam teori Marxis tentang sifat manusia, bahwa ada sebuah kesepakatan yang tidak tertulis menyatakan bahwa perempuan tidak berdaya, yang dibentuk dari hasil kesepakatan masyarakat. Kapitalisme dianggap sebagai laki-laki, yang memiliki sifat maskulin. Sehingga hal ini menjadikan perempuan sebagai masyarakat capital hanya sebagai objek pekerja, disbanding laki-laki yang dipandang sebagai majikan untuk memantau hasil kerja dari perempuan baik dalam ranah publik maupun domestik (Jane C. et al., 1996).

Jika dilihat melalui teori ekonomi Marxis, ada sebuah hubungan kekuasaan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan. baginya, kurang tepat jika menggunakan istilah pertukaran, karena dalam kenyataannya tidak ada hubungan pertukaran yang mana ada sebuah nilai yang dapat ditukarkan dari sebuah hasil kerja perempuan yang tidak pernah mendapat sebuah penghargaan baik itu nilai lebih atau setara. Sehingga yang terlihat adalah sebuah hubungan perbudakan, yang mana pendapat ini pula menjadi penguat bahwa bukan hanya kontraktual pekerjaan yang mengekang perempuan (Tong, 2017).

Lain halnya dengan teori Friedrich Engels yang menjadi salah satu landasan dasar dari aliran feminisme sosialis yang melihat bahwa status perempuan jatuh karena adanya sebuah konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi yang mulanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi berubah menjadi kebutuhan pertukaran (*exchange*).

Kebutuhan pertukaran tersebut dipantau oleh laki-laki dan hasilnya mereka memiliki dominasi atas perempuan (Effendi, 2003).

Kaum feminis sosialis, menganggap bahwa negara juga berperan atas adanya ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Sistem kapitalisme dapat tumbuh dan berkembang atas dukungan dari pihak pemerintah yang berkaitan tentang sosial dan ekonomi terhadap masyarakat (Sugihastuti, 2010).

Feminis sosialis dalam pemikiran banyak terpengaruhi oleh pemikir pada abad 20, yang melihat bahwa penindasan terhadap perempuan bukan hanya soal kelas atau seks, akan tetapi hubungan rumit antara kapitalisme dan patriarki. Selain itu, tindakan kekerasan terhadap perempuan dilakukan bukan hanya atas dasar alasan individu semata, akan tetapi struktur politik, sosial, dan ekonomi tempat individu berada juga memengaruhi (Effendi, 2003).

Bagi Marxis, ada dua faktor pendorong sejarah yakni material produksi dan reproduksi sosial. Kemudian Marx menegaskan, bahwa ada sebuah modus produksi yang dilatar belakangi oleh sosial, politik serta intelektual. Marx percaya bahwa hal tersebut menjadi pemicu dalam realitas ketidakadilan terhadap perempuan, karena perempuan selalu diawasi sedangkan laki-laki memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur, sehingga ketidakadilan tak dapat terelakkan (Nugroho, 2008).

Konsep ekonomi Marxis menjelaskan bahwa ada sebuah pembentukan "sifat-sifat alamian" perempuan yang digambarkan pula oleh kaum kapitalisme sebagai suatu masyarakat komoditi atau pasar yang di dalamnya memiliki segala sesuatu, termasuk adanya kekuatan kerja seseorang, harga yang dimiliki, dan transaksi yang pada dasarnya memiliki prinsip pertukaran. Akan tetapi kapitalisme menggunakannya lebih banyak sebagai eksploitasi kemampuan dan diri seorang perempuan (Illich, 2001).

Dalam sistem kemasyarakatan yang disampaikan Marxis, perempuan diibaratkan sebagai proletar dan laki-laki adalah borjuis. Di mana kaum borjuis sangat mahir membodohi kaum proletar. Karena adanya sebuah kelas yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki dan dapat bertindak. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat konseptual bagi feminis dalam menganalisis kekuasaan kelas yang terbentuk dalam masyarakat (Mosse, 1996; Probosiwi, 2015).

Marxis selanjutnya menawarkan sebuah analisa kelas yang diharapkan dapat membebaskan perempuan dari ketertindasan. Marxis bahkan berjanji untuk membuat kebebasan bagi manusia terutama kebebasan bagi perempuan. Pada akhirnya perempuan dan laki-laki dapat bersama-sama membangun sebuah struktur sosial dan peran sosial yang memungkinkan kedua gender untuk merealisasikan potensi kemanusiannya secara penuh dan harmonis.

Feminisme sosialis melihat ada sebuah gambaran sifat dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebuah sifat ketergantungan. Misalnya laki-laki bekerja di luar untuk mendapatkan uang, kemudian perempuan yang membelanjakannya. Gambaran tersebut tertolak dan tidak dibenarkan oleh kaum feminis sosialis. Menurut Margaret Benston, selaku tokoh feminis, perempuan adalah memiliki tanggung jawab untuk mengolah setiap pemasukan untuk nantinya disalurkan pada produsen yang lain untuk dapat dinikmati oleh keluarga, kemudian digunakan untuk setiap kegiatan yang dilakukan pada rumah dan keluarga. Karena yang dihasilkan oleh perempuan di rumah berupa makanan, rumah bersih, pakaian bersih, lingkungan nyaman bagi keluarga tidak diperjual belikan, maka masyarakat menganggap bahwa produksi di rumah adalah hal ringan dan sederhana dibandingkan produksi di luar rumah seperti makanan yang dipasarkan (seperti makanan instan). Menurut Benston, sosialisasi bukan hanya dilakukan dengan memberikan peluang bekerja di rana industri publik, akan tetapi sosialisasi pekerjaan rumah tangga juga penting untuk dilakukan, dan hal ini baginya adalah kunci dari kebebasan perempuan (Kasiyan, 2008).

Adanya pemahaman tentang tugas dan pekerjaan rumah tangga terhadap seluruh anggota yang kemudian dilakukan oleh perempuan menurut Benston tidak lantas perempuan lepas dari tanggung jawab terhadap rumah tangga, akan tetapi untuk menunjukkan bahwa untuk menyadarkan betapa pentingnya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan secara sosial. Dengan demikian masyarakat dapat memahami betapa sulitnya jika pekerjaan rumah tangga yang tak terhitung banyaknya hanya dilakukan oleh perempuan saja, sehingga masyarakat tidak lagi memandang perempuan yang hanya serba kebergantungan dan tidak mampu mandiri (Effendi, 2003).

Feminis sosialis melihat hal demikian yakni perempuan harus berperang melawan dua musuh sekaligus, yakni kapitalisme dan patriarki. Latar belakang adanya sebuah ketidasetaraan terhadap perempuan dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya perbedaan intelektual. Perbedaan intelektual menjadi peran penting dalam pertumbuhan ketidakesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan yang kurang akan menjadikan laki-laki memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengendalikan perempuan (Tong, 2017).

Unsur utama Feminisme sosialis berbeda dengan aliran feminisme yang lain adalah pada kapitalisme yang berisikan penindasan atas dasar kelas. Penindasan kelas ini berkaitan dengan bagaimana kapitalisme mengendalikan perempuan dan menempatkan perempuan pada tenaga kerja cadangan yang murah dan bodoh. Di mana upah yang diberikan kepada perempuan relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan pun tidak pernah dibayar atas pekerjaan-pekerjaan rumah, pelayanan gratis dalam menyediakan

makanan, sehingga perempuan dijadikan sumber keuntungan bagi kaum kapitalisme (Jane C. et al., 1996).

Pendapat feminisme sosialis kemudian dikuatkan oleh Engels yang mengulas tentang sejarah prakapitalisme, bahwa sejarah panjang dan kelam ketidakadilan yang dialami oleh perempuan merupakan dampak salah satunya yakni organisasi kekayaan, dan bukan disebabkan oleh perubahan teknologi (Kasiyan, 2008). Sehingga bagi feminisme sosialis, untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh perempuan adalah mengubah struktur kelas dan memutuskan hubungan dengan sistem kapitalisme secara universal.

Feminisme sosialis menegaskan dalam setiap kajiannya bahwa adanya opresi perempuan adalah bukan disebabkan kelasisme dan bukan seksisme. Penyebab fundamental opresi yang dialami oleh perempuan yakni adanya suatu keterkaitan yang sangat rumit antara kapitalisme dan patriarki. Sehingga opresi perempuan bukanlah sebuah tindakan yang disengaja oleh individu semata, melainkan sebuah produk sekaligus akibat dari struktur politik, kemudian sosial, serta ekonomi asal hidup perempuan tersebut.

## **2.2 Perempuan di Masa Pandemi Covid 19**

Pandemi Covid 19 di Indonesia merupakan rentetan duka bagi masyarakat baik dalam segi kesehatan, metanl, sosial, politik dan budaya. Sejak kemunculan awalnya di Wuhan China pada tanggal 31 Desember 2019, virus ini secara cepat dan global mampu membalikan kehidupan normal negara bahkan dunia. Siaga pandemi Covid 19 dikampanyekan hampir di seluruh media massa dan sosial di seluruh dunia. Data jumlah pasien yang tertular virus Corona setiap hari menunjukkan peningkatan yang tidak terkendalikan.

Di Indonesia ditetapkan pertama kali virus corona menjangkiti masyarakat yakni pada tanggal 2 maret 2020. Selang tidak lama dibandingkan negara asal virus tersebut, jumlah penularan meningkat dan tersebar begitu cepat di seluruh penjuru Indonesia. Terutama wilayah-wilayah padat penduduk. Sulitnya deteksi virus tersebut, menjadikan kesulitan sendiri bagi pihak kesehatan untuk memutus rantai pesebaran virus. Virus hanya dapat terdeteksi keberadaanya, jika yang terjangkit menimbulkan gejala-gejala, seperti pusing, mual, sesak nafas, suhu badan melebihi 37 derajat Celcius. Sehingga semua media massa menggencarkan info terkait gejala-gejala tersebut, dengan harapan bagi siapaun yang mengalami hal demikian dapat segera melapor pada pihak kesehatan terdekat.

Selain dari pihak kesehatan, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi pandemi Covid 19. Kebijakan pemerintah di mulai dengan mewajibkan seluruh masyarakat untuk selalu menggunakan masker terutama di luar ruangan, kemudian mencuci tangan setiap akan melakukan atau memegang benda, dan menjaga jarak. Kebijakan ini menekankan pada menjaga kebersihan diri. Akan tetapi, kebijakan tersebut belum mampu

menekan angka pasien yang terjangkit virus corona. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Sebelum pada keputusan PSBB, pemerintah mengusulkan untuk Lockdown yakni upaya penyekatan suatu wilayah terhadap wilayah yang lain yang diduga mampu mengindikasi penyebaran Covid 19. Akan tetapi presiden Joko Widodo menentang opsi tersebut karena dianggap akan mengganggu perekonomian nasional. Sehingga pada awal April 2020 pemerintah mengumumkan kebijakan PSBB. Kebijakan ini dilakukan secara berkala, wilayah yang memberlakukan kebijakan PSBB perdana adalah DKI Jakarta. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB. Pada tahap awal dilaksanakan pada tanggal 10-23 April 2020. Kemudian kebijakan tersebut diberlakukan diberbagai wilayah di Indoensia. Dalam kebijakan PSBB, masyarakat diperbolehkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok atau pekerja yang bekerja di sektor pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu semua aktivitas dialihkan di rumah, seperti bekerja, bersekolah, mengajar.

Sampai hampir 3 bulan lamanya kebijakan PSBB diberlakukan, masyarakat seakan terguncang dan terkekang. Semua aktivitas dilakukan di rumah, diharapkan dapat memudahkan seseorang untuk melakukannya, atau bersekolah dilakukan di rumah diharapkan untuk dapat lebih dekat dengan orang tuanya. Kenyataannya, PSBB meninggalkan jejak kelam yang tidak hanya berkaitan tentang virus atau kesehatan. Dalam waktu 24 jam semua anggota keluarga berkumpul tanpa ada jeda, tanpa ada kegiatan di luar rumah tentu ada sebuah perasaan jenuh yang amat sangat terpendam bagi masing-masing anggota keluarga. Hal ini tentu tidak sama dengan pertama kali kebijakan PSBB diberlakukan, akan tetapi pada saat 3 bulan kemudian semua anggota keluarga akan merasakan sebuah kejenuhan akan aktivitas yang melingkar-lingkar seakan-akan tanpa ujung dan kepastian. Sehingga pilihan untuk tetap di rumah demi menjaga diri dari terjangkit virus corona tidak lagi menjadi efektif.

Kebijakan PSBB yang mulanya menjadi harapan solusi bagi terputusnya rantai penyebaran virus corona, kini telah menjadi produk masalah baru, terutama di lingkungan keluarga. Nyatanya pada kebijakan PSBB banyak dari pekerja harus mendapat surat PHK, atau pemberhentian paksa tanpa diberi uang pesangon. Realita yang demikian semakin menambah sesak dalam kehidupan keluarga. Sedangkan semua keluarga berkumpul di rumah, kebutuhan harus tetap terpenuhi, akan tetapi sumber penghidupan terkikis atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka dalam kurun waktu 3 bulan, kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat drastis.

Merujuk pada data UN Women, laporan kasus KDRT selama pandemi yakni di Prancis terjadi peningkatan 30% kekerasan domestik, Argentina meningkat 25%. Dan di Indonesia meningkat menjadi 75% yakni 90 kasus per bulan dibandingkan biasanya 30 kasus per bulan.

Jumlah presentase tersebut adalah data berdasarkan laporan yang masuk dan dalam proses penanganan. Lantas bagaimana dengan data yang tidak dilaporkan karena terbatasnya akses atau kurangnya sosialisasi cara melapor, atau yang mempertahankan diri untuk melapor untuk menghindari stigma publik.

Merujuk pada data di atas, yang paling banyak mengalami dampak akan adanya pandemi Covid 19 adalah perempuan. Perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga terutama dalam mengatur kebutuhan keluarga. Perempuan di masa pandemi memiliki pekerjaan lebih ekstra karena semua anggota keluarga berada di rumah. Selain itu, perempuan dianggap harus mampu menjadi pendidik bagi anak saat pembelajaran jarak jauh, melayani suami lebih dari biasanya karena intensitas ruang lingkup yang dekat, mengatur pemasukan yang tidak pasti dengan pengeluaran setiap hari, menyiapkan makanan dan membersihkan rumah. Semuanya seakan-akan tidak ada henti, perputaran kegiatan yang dilakukan oleh perempuan. Terlebih perempuan bukan hanya dibutuhkan untuk mengatur kebutuhan keluarga, pada kebutuhan pelampiasan amarah suami karena adanya pemutusan kerja, atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maka yang menjadi pelampiasan adalah perempuan.

### **2.3 Peran Perempuan di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis**

Dalam perspektif Feminis Sosialis adanya sebuah ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan disebabkan oleh keterkaitan rumit antara kapitalisme dan patriarki. Perempuan mengalami ketidaksetaraan terutama pada tingkat keluarga. Di mana stigma perempuan harus serba bisa, perempuan harus mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi dalam keluarga, perempuan harus mampu mengolah baik keuangan, kebutuhan keluarga, dan perempuan bertanggung jawab atas anak-anak juga anggota keluarga di rumah, merupakan sedikit dari banyak tugas yang dibebankan oleh perempuan. Hal tersebut merupakan hasil dari politisasi kaum kapitalisme yang melihat perempuan sebagai kaum kedua yang mampu melakukan banyak pekerjaan tanpa harus dibayar (Budiman, 1985).

Sistem patriarki yang melekat pada sistem kerja keluarga, bahwa perempuan merupakan pekerja domestik dan laki-laki adalah pekerja publik (Poerwandari & Hidayat, 2000). Perempuan pada masa pandemi sangat merasakan hal tersebut, letak perbedaannya karena laki-laki diatur sebagai pekerja public, maka saat harus di rumah akan menimbulkan sebuah ketidakseimbangan pembagian tugas. Dan karena sistem pembagian tugas yang demikian, laki-laki tidak memiliki peran dan kemauan untuk melaksanakan tugas-tugas domestik (Hartmann, 2016). Walaupun perempuan memiliki tugas ekstra selama pandemi. Akan tetapi sistem patriarki tidak mengatur pembagian kerja dengan semestinya, sehingga perempuan tidak dapat lepas dari pekerjaan domestik yang tidak pernah selesai.

Feminisme Sosialis bertujuan untuk mencapai sebuah masyarakat sosialis yang dapat dimulai dari tingkat keluarga. Karena sistem egaliter dapat tercipta dalam keluarga akan mewujudkan sebuah cerminan kehidupan sosial keluarga. Perempuan yang mampu keluar dari stigma domestik yang dibentuk oleh patriarki akan membentuk sebuah kerjasama dalam keluarga. Sehingga yang terjalin adalah sebuah keluarga yang saling bekerjasama, keluarga yang harmonis dan keluarga yang saling menghargai (Tong, 2017).

Melalui pandangan feminisme sosialis melihat perempuan di masa pandemi Covid 19 memiliki dua mata sisi. Sisi pertama, perempuan sebagai sektor sentral di dalam rumah dituntut untuk mampu mengatur semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anggota rumah tangga, sehingga perempuan harus mampu mengajak seluruh anggota keluarga untuk bekerjasama dalam menyelesaikan semua tugas tersebut. Sisi kedua, perempuan berperan besar bukan hanya sebatas tentang kebutuhan rumah tangga, perempuan dalam masa pandemi mampu membantu perekonomian rumah tangga. Sehingga peran perempuan bukan hanya pihak kedua, akan tetapi *partner* untuk sama-sama kuat dan berjuang dalam masa pandemi Covid 19.

Dampak dan peran perempuan dalam pandemi direspon di berbagai kalangan baik dari kalangan pemerintah maupun sektor swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam webinar Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi menyatakan 93% pekerja dan pelaku dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah perempuan, sehingga perempuan memiliki dampak berat dan perlu direspon di dalam kebijakan pemerintah. Selanjutnya pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) yang ditujukan untuk keluarga di mana kepala keluarga perempuan yang menerimanya (Lubis, 2021; Riandari & Tri, 2021; Sandrina et al., n.d.; Setyorini, 2021). Selain itu, tenaga kesehatan yang kebanyakan adalah perempuan, maka perhatian terhadap pemulihan perempuan lebih diutamakan selama pandemi. Pada akhir acara, Sri Mulyani memberikan penekanan bahwa peran dan kontribusi perempuan menjadi factor penting dalam berbagai tantangan dalam upaya pemulihan, reformasi, serta transformasi ekonomi akibat pandemi.

Perempuan tidak melulu ditempatkan pada posisi tidak menguntungkan atau ketimpangan. Pernyataan tersebut mewakili peran perempuan di desa Banjaroya, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana, sebanyak 18 orang perempuan terlibat dalam penanganan kasus Covid sebagai satgas. Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang biasanya hanya minyak, beras, gula, dan telur; kini ditambahkan bumbu-bumbu dapur, kemudian kebutuhan anak seperti minyak telon, *pampers* dan lain-lain. semua kebutuhan tersebut hanya mampu dipahami oleh perempuan. Meski terlihat sederhana, tetapi penambahan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari tersebut memberikan dampak yang luar

biasa bagi masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh salah satu relawan perempuan yakni Devi (Sucahyo, 2021).

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono mempertegas peran perempuan lebih mampu berpikir cepat dan tanggap dalam mengatasi kesulitan dalam keluarga. Selain itu, kerjasama dari pihak terdekat yakni anggota keluarga adalah bagian penting yang beliau sampaikan dalam rapat koordinasi dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid 19, di ruang Adipura, Komplek Balai kota Tegal, pada Rabu, 13 Agustus 2020. Hal demikian selaras dengan tujuan feminisme sosialis bahwa perempuan mampu membangun sebuah peradaban melalui keluarga (Tegal, 2020).

Menurut Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag menjelaskan bahwa dalam situasi pandemi Covid 19, perempuan kembali pada sebuah kedadaran untuk berjuang menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Hal ini disampaikan langsung pada wawancara di FajarBanten.com. baginya, perempuan memiliki peran dan fungsi ganda bagi anggota keluarga untuk tetap aman, menciptakan suasana nyaman, dan membangkitkan optimisme (Administrator, 2020b).

Akan tetapi ada beberapa kategorisasi bagi perempuan dalam peran di masa pandemi. Misalnya dalam penanganan situasi pandemi bagi perempuan yang memiliki pendidikan mapan dengan yang kurang memiliki perbedaan. Seperti Astrid Safiera pekerja kantor yang terkena dampak pemberhentian sepihak oleh perusahaan dan beralih pada bisnis seafood online melalui twitter untuk media promosi. Astrid mampu mengatasi krisis ekonomi sekaligus memberikan keamanan bagi anak-anaknya terutama dalam menanamkan protokol kesehatan kepada keluarga selama masa pandemi Covid 19 (Novita, 2022).

Mengapa latar pendidikan juga mempengaruhi dalam penanganan pandemi Covid yakni pengetahuan dan pengalaman perempuan diyakini menjadi modal untuk menciptakan kedisiplinan kepada anggota keluarga dalam protokol kesehatan selama pandemi berlangsung. Tentu hal ini berbeda, saat perempuan minim informasi akan pandemi, protokol kesehatan dan Covid 19 itu sendiri. Walaupun secara global, semua perempuan benar-benar kewalahan mengatasi pekerjaan rumah yang semakin kompleks dan tidak pernah berhenti.

Melihat hal di atas, untuk memenuhi kualitas peran perempuan baik dalam ranah domestik dan publik, maka diperlukan sebuah pelatihan untuk mengembangkan skill dan kemampuan perempuan dalam management waktu dalam bidang keluarga, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Tentu hal ini dibutuhkan peran dari pemerintah untuk memberikan fasilitas pengembangan khusus bagi perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga.

Saat perempuan mampu mengelola setiap kegiatan domestik dan publik dengan baik, terutama dalam ekonomi, perempuan memiliki kesempatan dan peluang besar untuk keluar dari belenggu budaya patriarki yang menganggap perempuan dalam kendali dan ketergantungan terhadap laki-laki dalam finansial. Feminisme sosial berusaha mendorong

perempuan untuk mampu keluar dari budaya patriarki sekaligus dari keterikatan doktrin kapitalisme. Wujud perempuan mampu berperan dalam domestik dan publik adalah bentuk dari sebuah kebebasan dan kemerdekaan sesungguhnya bagi perempuan.

Dalam masa pandemi, perempuan dalam masa pandemi mampu bertahan lebih kuat dibandingkan laki-laki, sebab UMKM yang dijalankan oleh perempuan berhasil bertahan di masa pandemi Covid 19. UMKM yang dijalankan oleh perempuan meliputi usaha kuliner sebanyak 50%, usaha sembako 20%, usaha kriya 10%, usaha florikultura 10% dan usaha busana 10% ("PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona [JDIH BPK RI]," n.d.).

Kemampuan adaptasi dan inovasi yang dilakukan oleh UMKM perempuan membuat kenaikan omset selama pandemi berlangsung. Melalui pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan produk yang dimiliki dan target pasar yang luas menjadikan perempuan lebih fleksibel dalam memasarkan produk yang dimiliki. Hal ini membuktikan bahwa perempuan mampu bertahan di masa krisis seperti pandemi Covid 19. Walaupun masih banyak UMKM perempuan yang belum maksimal dalam penggunaan teknologi yang dimiliki.

Selain itu, permasalahan dasar dalam UMKM perempuan yakni permodalan. Masih banyak lembaga keuangan yang enggan memberikan pinjaman modal bagi pelaku UMKM perempuan. Hal ini tentu, diharapkan pemerintah dapat bersinergi dengan UKM, KPPA, dan OJK dalam merumuskan kebijakan dalam permodalan terkhusus bagi perempuan.

Melalui artikel yang diterbitkan oleh Prakarsa yakni institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan, mengajak seluruh UMKM perempuan untuk mengajukan usulan kepada pemerintah agar memberikan fasilitas pengembangan bagi UMKM (Adil & Goso, 2018; Fitriyani, 2019). Tentunya hal ini melihat bahwa UMKM memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional, maka hal-hal yang diusulkan kepada pemerintah yakni:

- 1) Pemerintah harus terus mendorong peran aktif lembaga keuangan dalam sektor UMKM. Revitalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendesak dilakukan terutama melalui ekstensifikasi penyaluran KUR kepada sektor usaha mikro dan kecil yang *unbankable*, termasuk usaha yang dimiliki atau dikelola oleh kelompok perempuan dengan bertumpu prinsip-prinsip keuangan inklusif.
- 2) Pemerintah perlu membuat instrumen monitoring dan evaluasi program yang efektif antara lain dengan optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kredit Program berbasis online untuk memastikan KUR tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih pembiayaan UMKM.

- 3) Pemerintah perlu melakukan sinergi antar kementerian dan lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas), BUMN, BUMD, BUMDes untuk menjadi penyangga sektor UMKM dengan memperkuat akses, kapasitas, dan konektivitas UMKM.
- 4) Pemerintah perlu melakukan kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk menyediakan fasilitas pendampingan usaha terutama terkait pelatihan teknik produksi yang mematuhi protokol kesehatan, penguasaan teknologi, serta pemasaran digital agar UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku dan preferensi konsumen dalam era tatanan baru (*new normal*) pasca Covid -19.

Feminsme sosialis menekankan bagi perempuan untuk bangkit dan mandiri terutama dalam ekonomi. Salah satu UMKM perempuan adalah pedagang sayur keliling di kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram. Di mana perempuan berdagang sayur keliling membantu suami yang pendapatannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ataupun perempuan yang hidup tanpa suami (janda) menghidupi dirinya dan anggota keluarganya. Hasilnya perempuan pedagang sayur keliling di kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram kota Mataram mampu memenuhi kebutuhan hidup disamping dari penghasilan suami. Walaupun demikian, perempuan di kelurahan Pagesangan tidak meninggalkan pekerjaan domestik saat berjualan sayur keliling. Sehingga perekonomian keluarga di sana relatif stabil dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, hal ini juga berlangsung saat pandemi Covid 19 (Juita, Mas`ad, & Arif, 2020).

Walaupun perempuan mampu melaksanakan peran ganda dalam ranah domestik maupun publik. Menurut Clark sebuah keluarga dikatakan seimbang atau *work family balance* di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dalam ranah kerja. Pembagian kerja pada setiap anggota keluarga membantu keseimbangan dan mengikis budaya patriarki dalam keluarga yang mengandalkan perempuan dalam menyelesaikan semua pekerjaan rumah (Clark, 2000).

Di masa pandemi, semua anggota bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang ada di dalam rumah. Hal ini menjadikan kekuatan bagi anggota keluarga untuk saling menguatkan dan menyesuaikan diri dalam gaya hidup di mana pandemi Covid -19. Saling memberikan penghargaan kepada anggota keluarga dalam melaksanakan pekerjaan rumah.

Feminis sosialis mengharapkan perempuan mampu keluar dari stigma pribadi yang menganggap bahwa perempuan harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga, jika tidak, maka perempuan tidak menjadi perempuan seutuhnya. Bagi feminis sosialis, melakukan pekerjaan rumah tangga yang dilimpahkan kepada perempuan adalah bentuk awal terjadinya budaya patriarki dalam keluarga. Keluarga yang diharapkan mampu memberikan lingkungan

nyaman, adil dan saling menyayangi. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan penanaman nilai yang adil gender baik anggota keluarga laki-laki atau perempuan. bagi feminis sosialis, keluarga adalah tahapan dasar seseorang mampu menjadi pribadi yang adil gender melalui pendidikan karakter yang diterapkan di rumah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggungjawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Melihat uraian tersebut, keluarga yang disebutkan adalah semua anggota keluarga, tidak terkecuali ibu saja, atau anggota keluarga perempuan saja, yakni semua anggota keluarga baik laki-laki atau perempuan. sehingga kesejahteraan adalah hak dan kewajiban bagi semua anggota keluarga (Awaru, 2021).

Feminis sosialis kemudian menyatakan bahwa saat sistem patriarki di keluarga kemudian adanya penghargaan bagi perempuan sebagai wujud merobohkan sistem kapitalisme maka perempuan mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Bagi kaum sosialis melihat kemandirian perempuan untuk lepas dari ketergantungan ekonomi kepada laki-laki. Perempuan mampu mandiri dalam ekonomi, terutama dalam masa pandemi Covid 19 adalah bentuk ketangguhan yang patut untuk dipertahankan. Walaupun saat perempuan mampu bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga tidak selamanya mendapat penghargaan, banyak dari mereka yang diremehkan dan tidak dianggap bekerja sebagaimana mestinya.

Perempuan yang bekerja melalui media sosial di masa pandemi, perempuan tidak dianggap sebagai bekerja. Anggapan bekerja di masyarakat adalah saat seseorang keluar dari rumah menuju kantor, sehingga diskriminasi terhadap perempuan pun masih berlangsung di lingkungan masyarakat, walaupun perempuan mampu memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Upaya dalam mewujudkan lingkungan yang adil gender memerlukan pemahaman bersama, sosialisasi dengan berbagai pihak mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Melihat kenyataan, bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi diskriminatif, sehingga perempuan terhambat dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan diri bagi perempuan. Padahal dalam berperan dalam menghadapi pandemi Covid 19 perempuan dituntut untuk mampu menjadi anggota keluarga yang paling berperan dalam menangani setiap permasalahan yang ada di rumah.

Feminisme sosialis dan perempuan di masa pandemi diharapkan dapat berperan aktif terutama dalam keluarga.

### 3. Kesimpulan

Feminisme sosialis merupakan bentuk pergerakan perempuan untuk mampu memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana laki-laki pada masa pasca revolusi industri. Tekanan dari budaya patriaki dan kapitalis yang mengekang perempuan sebagai pihak kedua bagi dalam rumah tangga, perekonomian, dan hal-hal lainnya. Perempuan dipaksa untuk berperan domestik dan dibatasi pada ruang publik. Keadaan yang demikian juga terjadi pada masa pandemi Covid 19. Semua keluarga berada dirumah karena adanya kebijakan PSBB, di mana perempuan sebagai pengatur keluarga memiliki peran ekstra baik dalam mengelola kebutuhan keluarga, menyiapkan kebutuhan keluarga, dan juga memenuhi kebutuhan keluarga.

Perempuan dalam pandangan Feminisme sosialis diarahkan untuk mampu bekerjasama dengan seluruh anggota keluarga untuk menjalankan tugas-tugas dalam keluarga. Perempuan mampu melakukan sebuah perubahan dimulai dari keluarga. Sehingga perempuan merupakan patner dalam keluarga bukan hanya sebagai seseorang yang memenuhi semua kebutuhan saja.

Di masa pandemi Covid 19 perempuan yang memahami peran dan fungsinya mampu untuk mengambil peran penting juga inovatif baik dalam ruang lingkup keluarga juga membantu perekonomian keluarga. Bukan hanya itu, perempuan juga berperan besar dalam penanganan Covid 19 baik dalam keluarga maupun masyarakat. Terbukti, banyak perempuan-perempuan hebat berperan di masa pandemi baik dalam ekonomi, kesehatan, sosial dan sektor-sektor lainnya. Hal ini pun dibenarkan oleh pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan selama pandemi di arahkan untuk membantu perempuan untuk keluar dari diskriminasi gender juga dalam membangun perekonomian negara.

### 4. Referensi

- Adil, A., & Goso, G. (2018). Peran Perempuan Kepala Keluarga Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengaruhnya Terhadap Kontribusi Perekonomian Keluarga. *Prosiding*. Retrieved from <http://journal.uncp.ac.id/index.php/proceeding/article/view/1298>
- Administrator. (2020a). Pandemi, Laki-Laki, dan Kontrasepsi. Retrieved July 13, 2021, from <https://rifka-annisa.org/id/berita/berita-umum/item/726-pandemi-laki-laki-dan-kontrasepsi>
- Administrator. (2020b). Revitalisasi Makna Perjuangan Perempuan Untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Menghadapi Covid -19 - Fajar Banten. Retrieved November 30, 2021, from Fajar Banten website: <https://www.fajarbanten.com/opini/pr-1331120766/revitalisasi-makna-perjuangan-perempuan-untuk-ketahanan-ekonomi-keluarga-dalam-menghadapi-Covid-19>
- Arivia, G. (2006). *Feminisme : Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Awaru, A. O. T. (2021). Sosiologi Keluarga. In Bahri (Ed.), *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Bantulu, Y. (2008). *Perceraian di Amerika Serikat pada Awal Abad ke-21*. Retrieved from

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/40610>

- Bryson, V. (2003). *Feminist Political Theory : An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Budiman, A. (1985). *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Clark, S. C. (2000). Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. *Human Relations*, 53(6), 747–770. <https://doi.org/10.1177/0018726700536001>
- Clifford, A. M. (2002). *Memperkenalkan Teologi Feminis*. Maumere: Ledalero.
- Covid -19 di India: “Perdana Menteri Narendra Modi, mohon agar laki-laki didorong berbagi pekerjaan rumah tangga!” (2020, July 23). Retrieved July 29, 2021, from BBC News Indonesia website: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53500394>
- Dafeni, S. R., Mawarni, A., Nugroho, D., & Dharmawan, Y. (2017). Hubungan Beberapa Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Istri Pus di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik tahun 2016. *Jurnal Kesehatan ...*, 5(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jkm.v5i4.18357>
- Djajanegara, S. (2000). *Kritik Sastra Feminis : Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, G. A. (2003). *Filsafat Perperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- Fitriyani, F. (2019). *Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau dari Ekonomi Syariah (Studi pada Pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Lebak)*.
- Gusliana, H. B. (2010). Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami terhadap Istri di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*. Retrieved from <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/482>
- Haekal, M., & Fitri, A. (2020). Dilema Peran Ganda Dosen Perempuan Selama Pandemi Covid -19 di Indonesia. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 4(2), 171–182. <https://doi.org/10.36339/JASPT.V4I2.366>
- Hartmann, H. I. (2016). The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a more Progressive Union. <Http://Dx.Doi.Org/10.1177/030981687900800102>, 3(2), 1–33. <https://doi.org/10.1177/030981687900800102>
- Hombres, A. (1992). *Perubahan Peran Pria & Wanita Dalam Gereja & Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Illich, I. (2001). *Matinya Gender* (Cetakan ke). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Janah, N. (2017). Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Nasaruddin Umar. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1707>
- Jane C., O., Helen A., M., Terj. Budi, S., & Yan, S. (1996). *Sosiologi Wanita*. Rineka Cipta.
- Jones, D. (1991). New Vitality: The Challenge from Feminist Theology. *Nature*, 353(6339), 22. <https://doi.org/10.1038/353022a0>
- Juita, F., Mas`ad, M., & Arif, A. (2020). Peran Perempuan Pedagang Sayur Keliling Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID -19 di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 100–107. <https://doi.org/10.31764/CIVICUS.V8I2.2916>
- Kasiyan. (2008). *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*. Yogyakarta: Ombak.
- Klikdokter, T. M. (2020). Penyebab Peningkatan Kasus Perceraian saat Pandemi COVID -19 -

- KlikDokter. Retrieved April 29, 2021, from <https://www.klikdokter.com/info-sehat/Covid-19/penyebab-peningkatan-kasus-perceraian-saat-pandemi-Covid-19>
- Lubis, J. S. (2021). *Peran Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan*. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12487>
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muna, A. N., Rauf, D. T. B., & Krismantari, I. (2020). Angka KDRT di Indonesia meningkat sejak pandemi COVID-19: penyebab dan cara mengatasinya. *The Conversation*.
- Napsiah, N., Permata, A. N., Fithriya, D. N. L., & Hikmalisa, H. (2021). The Existence of Women's Roles during the COVID-19 Pandemi: A Case Study of 3 Women in Yogyakarta. *Society*, 9(2), 477-489. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.326>
- Novita, T. (2022). Perempuan, "Digital Skills" dan Ekonomi Inklusif. Retrieved April 10, 2022, from news.detik.com website: <https://news.detik.com/kolom/d-6043583/perempuan-digital-skills-dan-ekonomi-inklusif>
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi: Pengaruh-utamanya Di Indonesia / Riant Nugroho*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved November 29, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136892/pmk-no-23pmk032020>
- Poerwandari, E. K., & Hidayat, R. S. (2000). *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role on Social Welfare Development). *Natapraja*, 3(1). <https://doi.org/10.21831/jnp.v3i1.11957>
- Riandari, & Tri, F. (2021). *Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar (Studi Analisis di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar)*. Retrieved from <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/917>
- Sakdiyah. (2021). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Ma. *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1), 1-14. <https://doi.org/10.22373/TAKAMUL.V10I1.12589>
- Sandrina, N. M., Pratiwi, A., Kabupaten Buleleng, A., Program, B., Pembangunan, S., Dan, E., & Masyarakat, P. (n.d.). *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*.
- Sandrine, L., & Amelia, B. (2020, November 26). Pandemi Covid-19 Menambah Beban bagi Perempuan dan "Bisa Menghapus Perjuangan 25 Tahun dalam Menciptakan Kesetaraan Gender." Retrieved January 2, 2021, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55072850>
- Sapija, A. A. (2019). *Peran perempuan jepang dalam bidang ekonomi sebelum dan sesudah kebijakan womenomics dipandang dari perspektif feminisme marxisme dan sosialis*. Universitas Brawijaya.
- Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2020). Peran Perempuan dalam Keluarga untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Dimasa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati 2020*. Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/prosidingwebinarwanita/article/view/1251>

- Sari, E. K., & Zufar, B. N. F. (2021). Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid -19. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.31538/ALMADA.V4I1.1106>
- Setyorini, R. (2021). *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga untuk Mewujudkan Sustainable Livelihood (Studi Kasus di Yayasan SPEK-HAM Surakarta)*. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/82913/Pemberdayaan-Perempuan-Kepala-Keluarga-untuk-Mewujudkan-Sustainable-Livelihood-Studi-Kasus-di-Yayasan-SPEK-HAM-Surakarta>
- Sigiro, A. N. (2020). Women and Covid -19 Pandemi. *Jurnal Perempuan*, 25(4), iii–iv. <https://doi.org/10.34309/JP.V25I4.524>
- Sjahrir, S. (1982). *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Yogyakarta: Jakarta Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional.
- Sucahyo, N. (n.d.). Cerai di Masa Pandemi: Ditahan PSBB, Didorong Ekonomi. Retrieved January 29, 2021, from 2020 website: <https://www.voaindonesia.com/a/cerai-di-masa-pandemi-ditahan-psbb-didorong-ekonomi-/5578035.html>
- Sucahyo, N. (2021). Peran Perempuan dalam Penanganan Pandemi Berdampak Signifikan. *Voa Indonesia*. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/peran-perempuan-dalam-penanganan-pandemi-berdampak-signifikan/5808940.html>
- Sugihastuti. (2010). Gender dan Inferioritas Perempuan : Praktik Kritik Sastra Feminis. In *Pustaka Pelajar*. Retrieved from [http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=1831](http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1831)
- Sugihastuti, & Saptiawan, I. H. (2010). *Gender & inferioritas perempuan: praktik kritik sastra feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tegal, P. (2020). Pemberdayaan Perempuan Berperan Besar Lawan Covid -19. *Jatengprov.Go.Id*. Retrieved from <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemberdayaan-perempuan-berperan-besar-lawan-Covid -19/>
- Tong, R. P. (2017). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Umar, N., Mas'ud, H., & Husain, Z. A. (2017). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Makassar: CV. Kreatif Lenggara.
- Wakela, D., & Nurkhotijah, S. (2020). Analisis Yuridis Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Penelitian Pada Kantor Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*. Retrieved from <http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan/article/view/399>
- Windi. (2022). *Tinjauan Terhadap Angka Perceraian Akibat Dampak dari Covid -19 di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.

**Penghargaan:** Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak dalam membantu penelitian ini terutama Dekan Fakultas Ushuluddin yang telah membimbing penulis selama penyusunan penelitian ini.